1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   a. Pada bulan April 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,35% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,54. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 0,88% sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 2,58 %. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada April 2026, antara lain tahu mentah, bakso siap santap, melon, minyak goreng, daging sapi, tempe, ikan gurame, bayam, kue kering berminyak, kopi bubuk, gula pasir, terong, jagung manis, Sigaret Kretek Mesin (SKM), tarif kereta api, bawang merah, dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2026, antara lain emas perhiasan, tomat, daging ayam ras, sewa rumah, telur ayam ras, semangka, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, tahu mentah, daging sapi, beras, jagung manis, melon, Sigaret Putih Mesin (SPM), terong, pindang asin, bakso siap santap, kacang panjang, anggur, dan kopi bubuk.

   b. Pada bulan Mei 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MM) sebesar 0,29% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,87. Laju Inflasi Tahun Kalender (YD) sebesar 1,17 %, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 3,30%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Mei 2026, antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, pindang asin, tomat, tahu mentah, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, beras, semangka, ayam hidup, sawi hijau, salem diawetkan, makanan ringan/snack, tempe, terong, bayam, air kemasan, dan jus buah siap saji. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Mei 2026, antara lain emas perhiasan, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, sewa rumah, minyak goreng, bawang merah, semangka, tahu mentah, pindang asin, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai merah, daging sapi, jagung manis, terong, bahan bakar rumah tangga, Sigaret Putih Mesin (SPM), telur ayam ras, dan ayam hidup.

   c. Pada bulan Juni 2026 Kabupaten Bojonegoro mengalami inflasi Month to Month (MtM) sebesar 0,21% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,11. Laju Inflasi Tahun Kalender (YtD) sebesar 1,39%, sedangkan laju inflasi Year on Year (YoY) sebesar 2,94%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Juni 2026, antara lain bensin, bawang putih, pindang asin, bawang merah, anggur, wortel, minyak goreng, mainan anak, cabai merah, dan jeruk. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2026, antara lain emas perhiasan, tomat, pindang asin, sewa rumah, minyak goreng, bensin, cabai rawit, tahu mentah, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging sapi, semangka, beras, bahan bakar rumah tangga, jagung manis, Sigaret Putih Mesin (SPM), wortel, dan anggur.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Bulan April 2026:

   a. Kenaikan harga tahu mentah di Kabupaten Bojonegoro dipicu oleh melonjaknya harga plastik mencapai 50-100% pada April 2026. Karena rata-rata penyajian tahu mentah di Bojonegoro menggunakan kemasan plastik, para perajin dan pedagang mengalami peningkatan biaya produksi yang signifikan dan akhirnya menaikkan harga jual produk.

b. Pasca puasa dan Idul Fitri 2026, permintaan daging ayam ras di Kabupaten Bojonegoro kembali normal sehingga harga mengalami penurunan dibandingkan saat puncak Ramadhan. Meski demikian, harga mash tergolong mahal di level Rp37.000-Rp38.000 per kilogram.

c. Harga cabai rawit di Bojonegoro turun pasca Idul Fitri 2026. Penyebabnya: curah hujan berkurang sehingga panen lokal melimpah, pasokan lebih banyak dibanding bulan sebelumnya, dan permintaan menurun setelah lebaran

Bulan Mei 2026:

a. Harga cabai rawit dan cabai merah naik disebabkan stok panen sedikit dan terjadi peningkatan permintaan konsumen menjelang hari raya Idul Adha 2026.

b. Pasca puasa dan Idul Fitri 2026, permintaan daging ayam ras di Kabupaten Bojonegoro kembali normal sehingga harga mengalami penurunan dibandingkan saat puncak Ramadhan. Pada bulan ini daging ayam ras mengalami penurunan kembali dibandingkan bulan April karena permintaan dari konsumen menurun.

Bulan Juni 2026:

a. Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia akibat konflik ketegangan di Timur Tengah sejak Februari 2026. Pertamina menetapkan harga baru untuk BBM non-subsidi, yakni Pertamax (RON 92) sebesar Rp16.250 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.950 dari harga sebelumnya, serta Pertamax Green 95 sebesar Rp 17.000 per liter atau naik Rp4.100 dari harga lama.

b. Kenaikan harga bawang putih terjadi akibat minimnya pasokan di pasaran, mengingat komoditas ini masih sangat bergantung pada impor.

c. Penurunan harga daging ayam dan telur ayam disebabkan oleh liburnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pasokan di pasaran yang tidak diimbangi dengan serapan atau daya beli masyarakat yang tinggi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah melaksanakan 27 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis.
    2. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkopum) telah melaksanakan 47 kali Operasi Pasar Murah (OPM), dengan 30 kegiatan di antaranya dilaksanakan selama bulan Ramadan sebagai upaya mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok. Komoditas yang dipasarkan meliputi beras SPHP, beras premium, Minyakita, telur ayam ras, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kentang, wortel, serta LPG, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
    3. Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan produksi hortikultura masyarakat, DKPP telah mendistribusikan sekitar 11.000 bibit

tanaman pekarangan kepada masyarakat. Program ini bertujuan mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sekaligus mendukung pengendalian inflasi dari sisi penyediaan pasokan pangan.

4. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DKPP juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 kepada sejumlah Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta mendukung peningkatan produksi pangan daerah.
5. Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi energi, Disdagkopum secara rutin melaksanakan monitoring terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai langkah antisipatif terhadap potensi keterlambatan pasokan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terus memperkuat pemberdayaan peternak lokal melalui Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan adalah memfasilitasi pemasaran telur hasil produksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui kegiatan penjualan rutin setiap hari Jumat di Kantor Disnakkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan pendapatan peternak.
7. Sebagai bentuk keberpihakan terhadap peternak lokal, Bupati Bojonegoro menerbitkan Surat Edaran Nomor 524/605/412.222/2026 tentang Pembelian Telur Ayam dari Keluarga Penerima Manfaat Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dan Peternak Ayam Petelur Lokal. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8. Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) terus memfasilitasi pelaku Industri Keil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengurusan merek, desain produk, sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI, serta berbagai program peningkatan kapasitas usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing usaha.
9. Disperinaker juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pelaku IKM sebagai bagian dari penguatan struktur ekonomi kerakyatan. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk, kemampuan manajerial, serta adaptif terhadap perkembangan pasar sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pemasaran.
10. Kegiatan Car Free Day (CFD) terus dimanfaatkan sebagai media pemberdayaan UMKM lokal. Pada Triwulan II Tahun 2026, sekitar 700 pelaku UMKM berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan berhasil mencatatkan omzet yang memberikan kontribusi positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan pelaku usaha.
11. Dalam mengantisipasi dampak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai melaksanakan berbagai langkah mitigasi berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG yang memperkirakan awal musim kemarau di Kabupaten Bojonegoro berlangsung secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Langkah preventif ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kekeringan yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan pangan.
12. Sebagai bagian dari upaya mitigasi kekeringan, DKPP melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain percepatan masa tanam dengan memanfaatkan sisa kelembapan tanah, optimalisasi infrastruktur sumber daya air melalui penggunaan pompa air di titik-

titik strategis, pembersihan saluran irigasi, pengaturan pola tanam pada wilayah dengan keterbatasan air, serta mendorong petani memanfaatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal panen.

13. Dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman fenomena El Niño dan tren penurunan luas baku sawah nasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpartisipasi aktif dalam Gerakan Percepatan Tanam Serempak se-Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penerapan inovasi teknologi pertanian, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan petani guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi, identifikasi permasalahan, serta pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bojonegoro secara umum telah berjalan efektif melalui sinergi antar perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai intervensi yang dilakukan mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis di tengah adanya tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh faktor musiman maupun faktor eksternal.

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) secara intensif, khususnya selama bulan Ramadan, memberikan kontribusi positif dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pangan pokok dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan berbagai komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan LPG pada kegiatan tersebut turut membantu menekan potensi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan hingga Iduladha.

Dari sisi ketersediaan pasokan, berbagai program penguatan sektor pertanian dan peternakan telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran bibit tanaman pekarangan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), percepatan masa tanam, pembangunan sistem mitigasi kekeringan, serta pelaksanaan Gerakan Percepatan Tanam Serempak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga keberlanjutan pasokan pangan. Di sektor peternakan, penguatan Program Gayatri melalui fasilitasi pemasaran dan penerbitan Surat Edaran Bupati mengenai pembelian telur dari peternak lokal merupakan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan serapan hasil produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak.

Upaya pemberdayaan pelaku usaha melalui fasilitasi sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI, pengembangan merek, bimbingan teknis IKM, serta pemberdayaan UMKM melalui kegiatan Car Free Day (CFD) juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing usaha dan penguatan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan barang dan jasa.

Meskipun demikian, pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 mash menghadapi sejumlah tantangan yang dipengaruhi oleh faktor di luar kendali pemerintah daerah. Kenaikan harga BBM non-subsidi akibat meningkatnya harga minyak dunia dan konflik geopolitik di

Timur Tengah memberikan tekanan terhadap biaya distribusi. Selain itu, keterbatasan pasokan bawang putih sebagai komoditas impor menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen. Fluktuasi harga cabai juga masih dipengaruhi oleh kondisi produksi dan pola permintaan musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Di sisi lain, penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras akibat berkurangnya serapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan perlunya penguatan sisi hilir agar keseimbangan antara produksi dan permintaan tetap terjaga.

Secara keseluruhan, kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2026 telah mampu menjaga laju inflasi Kabupaten Bojonegoro tetap berada pada kisaran yang terkendali. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antar anggota TPID, pelaksanaan intervensi pasar secara tepat waktu, penguatan produksi pangan lokal, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Ke depan, efektivitas kebijakan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pemantauan harga dan pasokan secara berkala, optimalisasi program peningkatan produksi pangan, serta langkah antisipatif terhadap risiko perubahan iklim dan dinamika ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas inflasi daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) secara berkelanjutan, terutama pada wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas strategis serta menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.
    2. Meningkatkan pemantauan harga, stok, dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok maupun komoditas strategis melalui koordinasi intensif antaranggota TPID, Bulog, distributor, pelaku usaha, serta instansi terkait agar potensi kelangkaan pasokan dapat diantisipasi sejak dini.
    3. Memperkuat upaya peningkatan produksi pangan daerah melalui percepatan masa tanam, optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan, penyaluran bibit dan alat mesin pertanian (alsintan), serta penguatan program peternakan sebagai langkah menjaga keberlanjutan pasokan pangan.
    4. Mengoptimalkan mitigasi dampak musim kemarau dan perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan pompa air, normalisasi saluran irigasi, pengaturan pola tanam sesuai kondisi wilayah, serta perluasan kepesertaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna menjaga produktivitas pertanian.
    5. Menguatkan hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian serta peternakan, termasuk optimalisasi implementasi Surat Edaran Bupati mengenai pembelian telur peternak lokal dan penguatan peran BUMDes maupun koperasi sebagai offtaker untuk menjaga keberlanjutan usaha petani dan peternak.
    6. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan instansi terkait dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga komoditas impor, fluktuasi harga energi, serta gangguan rantai pasok yang dipengaruhi kondisi ekonomi global.
    7. Mendorong diversifikasi pangan dan pemanfaatan pekarangan rumah melalui perluasan distribusi bibit tanaman pangan serta edukasi kepada masyarakat guna memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu.
    8. Memperkuat pemberdayaan IKM dan UMKM melalui fasilitasi sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan merek, peningkatan kualitas produk,

digitalisasi pemasaran, dan perluasan akses pasar sehingga mampu meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

9. Meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui penyampaian informasi perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta langkah-langkah pengendalian inflasi secara berkala kepada masyarakat guna mendorong perilaku konsumsi yang bijak dan mengurangi kepanikan pasar.
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi dengan memperkuat analisis data harga, identifikasi komoditas penyumbang inflasi, serta penyusunan langkah intervensi yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berbasis kondisi riil di lapangan.